

# **KEDUDUKAN SURAT PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DALAM PEYALURAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan kepada pegawai atas diangkatnya pegawai tersebut dari tenaga pegawai kontrak menjadi tetap. Tetapi pada prakteknya terdapat suatu fenomena, dimana dianggap sebagai jaminan dalam transaksi perkreditan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta (selanjutnya disebut SKPPS), terutama bagi debitur yang bekerja pada suatu perusahaan swasta. Problematika hukum yang muncul apakah SKPPS dapat dikualifikasikan sebagai jaminan, bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank apabila SKPPS tidak dapat dikualifikasikan sebagai jaminan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder penelitian ini mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan yang terkait dengan jaminan dan peraturan yang mengenai sistem hukum jamiann di Indonesia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan pribmer terdiri atas penjelasan undang-uang yang terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan metode yuridis normatif dapat diketahui kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta dalam perjanjian kredit bank berdasarkan perspektif hukum jaminan di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi bank apabila SKPPS bukan merupakan bentuk jaminan.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa ,didalam sistem hukum jaminan di Indonesia tidak mengenal Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta sebagai jaminan, maka sudah jelas bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta bukanlah merupakan jaminan namun hanyalah sebagai persyaratan untuk melengkapi perjanjian kredit bagi nasabah untuk produk bank yaitu berupa KTA (Kredit Tanpa Agunan). Dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta bukanlah merupakan suatu jaminn di Indonesia maka sudah dipastikan bank tidak mendapatkan perlindungan apapun. Maka apabila debitur ingin memperoleh fasilitas kredit, debitur harus meminta pihak ketiga dalam hal itu perusahaan tempat nasabah bekerja untuk menjamin dengan *personal guarantee* yang menjadi jaminan untuk pembayaran kredit apabila kredit disetujui oleh bank dengan memberikan surat kuasa pemotongan gaji.

**Kata kunci: SKPPS, Perjanjian Kredit, Jaminan**

**OFFICIAL LETTER OF APPOINTMENT POSITION UNDER  
PRIVATE LAW PERSPECTIVES IN THE DISTRIBUTION  
OF LOAN BANK GUARANTEE  
IN INDONESIA**

**ABSTRACT**

In credit transaction, there are clients that gave a guarantee in form of decree of private employment contract, especially for the debtor who works at a private company. Legal issues that arise from this situation include whether a private employment contract can be qualified into the legal guarantees in Indonesia, how does the legal protection of private employment contract in banking lending transactions.

In this research, writer used the method with normative juridical approach, which is this research is a literature research. Library materials is a basic data in this research that is classified as secondary data. Secondary data research include of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials include legislation that related to the the regulation of insurance and guarantee legal system in Indonesia. Secondary legal materials are library materials that contain information about the primary material consists of explanations related legislation. Tertiary legal materials are legal supporting materials that give a clue to the primary and secondary legal materials. With normative juridical method, can be known the position of decree of private employment contract based on the perspective legal of guarantees in Indonesia which decree of private employment contract does not go into the legal category of collateral in Indonesia.

Legal system in Indonesia does not recognize a decree of private employment contract as a collateral, then it is obvious that decree of private employment contract is not a collateral, but simply as requirements to complete a loan agreement for the bank's customers for products such as credit without collateral. Due to the decree of private employment contract is not a guarantee in Indonesia it has been ascertained the bank does not get any legal protection. So if the debtor would like to obtain a credit facilities, debtor should ask third parties, in this case the third parties is the company where the debtor work to ensure with corporate guarantee to pledged as collateral for a loan if credit payments is approved by the bank with provide a power of salary deduction.

Keywords: Bank lending, Legal guarantees, Legal protection.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian	.....	ii
Halaman Pengesahan	.....	iii
Pembimbing		
Halaman Persetujuan Panitia	.....	iv
Sidang		
Abstrak	.....	v
Abstrack	.....	vi
Kata Pengantar	.....	vii
Daftar Isi	.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan dan Identifikasi Masalah .....	4
	C. Tujuan Penelitian .....	4
	D. Kegunaan Penelitian .....	5
	E. Kerangka Pemikiran .....	5
	F. Metode Penelitian .....	29
	G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II</b>	<b>LEMBAGA JAMINAN DALAM</b>	
	<b>SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>35</b>

A. Jaminan Pada Umumnya .....	35
1. Jaminan Umum .....	39
a. Jaminan Atas Benda Tidak Bergerak .....	42
b. Jaminan Atas Benda Bergerak .....	42
1) Gadai .....	43
2) Fidusia .....	47
2. Jaminan Khusus .....	56
a. Jaminan Perorangan .....	56
b. Jaminan Kebendaan .....	58
c. Hak Retensi .....	59

### **BAB III**

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **PENGANGKATAN PEGAWAI**

#### **SWASTA DALAM PERJANJIAN**

#### **KREDIT ANTARA BANK DAN**

#### **NASABAH .....** 64

##### A. Perjanjian Sebagai Dasar Landasan

Hukum Antara Bank Dan Nasabah ..... 64

1. Perjanjian Pada Umumnya ..... 64

2. Syarat Sah Perjanjian ..... 67

a.	Saat Lahirnya Perjanjian .....	69
b.	Pembatalan dan Pelaksanaan Perjanjian .....	71
3.	Asas Perjanjian .....	77
B.	Perjanjian Kredit Dalam Hukum Nasional Indonesia .....	81
1.	Pengertian dan Unsur-unsur Kredit .....	81
2.	Jenis Kredit Perbankan .....	83
C.	Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta Dalam Transaksi Perkreditan .....	85
1.	Pengertian dan Fungsi Berbagai Macam Surat .....	85
2.	Jenis Surat .....	85
D.	Perngertian Dan Bentuk Surat Dari Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta .....	88
1.	Pengertian Surat Keputusan .....	88
2.	Bentuk Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta ....	88

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI SWASTA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>93</b>
	A. Kedudukan Surat Keputusan Pangkatan Pegawai Swasta Dalam Perjanjian Kredit .....	93
	B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Tidak Dikualifikasikannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta Sebagai Bentuk Jaminan .....	102
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
	A. Kesimpulan .....	109
	B. Saran .....	110
LAMPIRAN	.....	111
DAFTAR PUSTAKA	.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	117